**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terbagi atas beberapa sub bab, yaitu landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu, yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Yang ketiga adalah kerangka pemikiran, yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Yang terakhir adalah hipotesis, merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Perpajakan**
3. **Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy (2016:1) dari segi ekonomi pajak adalah pemindahan sumber daya dari sector privat (perusahaan) ke sektor publik. Sedangkan bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

1. **Fungsi Pajak**

Sebagaimana diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, Waluyo (2017:6) menyebutkan adanya dua fungsi pajak, yaitu:

* + 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:9), asas pemungutan pajak terdiri atas tiga asas, antara lain:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

1. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

1. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

1. **Tarif Pajak**

Wajib pajak badan dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (*world wide income*). Karena perlakuan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan melalui BUT di Indonesia dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia, maka penghasilan BUT yang dikenakan pajak adalah penghasilan baik yang bersumber dari Indonesia maupun luar Indoesia. Semua penghasilan pada akhir tahun pajak digabungkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak, kecuali penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang bukan Objek Pajak (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>)

Menurut Resmi (2017:120), tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh). Selain itu, Resmi (2017:120) juga mengatakan bahwa bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh yang terutang pada dasarnya sama dengan cara penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

1. Tarif yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 (1) huruf b UU PPh
2. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut:

PKP = Penghasilan neto

= (Peredaran bruto – Pengeluaran/Biaya yang boleh dikurangkan)

1. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak:

PPh terutang = Tarif x PKP

= Tarif x (Peredaran bruto –Biaya yang boleh dikurangkan)

1. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10), terdapat dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

* + 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
    2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
    3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
    4. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax Avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Seperti yang dikatakan Pohan (2017: 24), *tax avoidance* adalah usaha memperkecil jumlah pajak dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.

1. *Tax Evasion*

Usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Menurut Pohan (2017:23), *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminil. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

1. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

*Adverse selection* adalah kondisi yang menunjukkan posisi principal tidak mendapatkan informasi secara cermat mengenai kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi agen (manajemen) atau program kompensasi lain. Moral hazard berkaitan dengan kondisi principal tidak mendapatkan kepastian bahwa agen telah berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Sarra, 2017). Eisenhardt (1989) mengatakan jika teori agensi memiliki tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri *(self interest),*

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang

(*bounded rationality*), dan

3. Manusia selalu menghindari resiko *(risk averse).*

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

1. **Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)**

Dengan berkembangnya dunia bisnis di era modern ini, perusahaan diharapkan mampu memperhatikan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pada pemegang saham saja. Hal ini akan bermanfaat untuk mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.

Teori *Stakeholder* adalah teori yang berfokus pada hubungan antara organisasi atau perusahaan dan stakeholder. *Stakeholder* sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu perusahaan manajemen meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan (pemegang saham, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan lain-lain tidak hanya peduli dengan kepentingan. Hal ini menunjukan bahwa suatu perusahaan atau organisasi sangat membutuhkan peran dari pihak luar, seperti masyarakat dan linkungan sekitar sehingga sebuah perusahaan sangat bergantung pada dukungan *stakeholder*-nya.

1. ***Tax Avoidance***

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar *tax burden* (beban pajak) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan *after tax return* (penghasilan setelah pajak) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016). Seperti yang dikatakan oleh Pohan (2017:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan pengusaha untuk bisa membangun posisi kepemimpinan biaya adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Menurut Pohan (2017:13), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Pohan (2017:5) mengatakan bahwa, secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Semua fungsi manajemen tercakup dalam *tax management.* Dalam melaksanakan fungsi *tax management, tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih popular daripada *tax management* itu sendiri.

Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi *tax planning* ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (*tax planner*) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-*update* diri dengan setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

Dalam Pohan (2017:7), perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Seperti yang dikatakan Pohan (2017:14), tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak), adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidanafiskal, atau kriminil. Oleh sebab itu, tax planner yang baik, cara ni tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dai *tax avoidance*
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

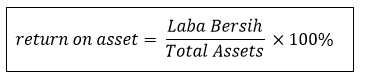
Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan metode pengukuran *Current Effective Tax Rate (Current ETR).* Pohan (2016:14) mengatakan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Menurut Pohan (2016:10-11), strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu *tax avoidance*. Contoh: pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

1. ***Profitabilitas***

Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

*Return on asset* berfungsi sebagai indikator untuk menggambarkan performa dari keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa dari suatu perusahaan. Oktamawati (2017) mengungkapkan ROA yaitu keuntungan bersih yang di dapat dari hasil menggunakan aktiva. Saputra dan Asyik (2017) berpendapat bahwa ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan membiayai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan rumus ROA yaitu :



Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. Semakin besar nilai ROA, berarti semakin besar nilai dari laba bersih perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aktiva perusahaan.

Menurut Gitman dan Zutter (2015:128-131) mengukur profitabilitas dapat menggunakan rasio profitabilitas yaitu

1. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor)

Marjin laba kotor mengukur mengukur berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. *Operating Profit Margin* (Marjin Laba Operasi)

Marjin laba operasi mengukur mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga dan pajak. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. *Net Profit Margin*

Marjin laba bersih mengukur persentase dari penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. *Earning Per Share* (EPS)

EPS mengukur tingat keuntungan dari per lembar saham. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. *Return on Total Asset* (ROA)

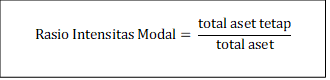
ROA sering juga disebut ROI (*Return on Investment*) mengukur keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi laba perusahaan atas total aset maka akan semakin baik. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. *Return in Equity* (ROE)

ROE mengukur tingkat pengembalian dari modal sendiri atau investasi para pemegang saham biasa. Umumnya, semakin tinggi pengembalian ini, semakin baik bagi pemiliknya. Perhitungan ini dapat diperoleh dengan rumus :

1. ***Capital Intensity***

Wiguna dan Jati (2017) mengatakan bahwa rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap Menurut Putra dan Merkusiwati (2016), *Capital intensity* *ratio* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Wijayanti et al.c. (2017), pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan rumus *Capital Intensity* yaitu :



1. ***Multinationality***

Menurut Sartono (2014) perusahaan *multinational* atau *multinational corporation* adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya di dua negara atau lebih sehingga dalam aktivitas utamanya melibatkan lebih dari dua mata uang yang berbeda. Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi operasi lintas negara dengan membuka agen atau cabang.

Menurut [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), multinasional berarti terjadi atas beberapa negara atau bangsa: perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagainegara. *Multinational company* adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berada di negara yang berbeda-beda (Hidayah, 2015). Menurut Dewi dan Jati (2014), perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, di mana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), terdapat tiga alasan perusahaan multinasional lebih sering menggunakan penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi beban pajaknya, yaitu:

1. Masih adanya celah perbedaan tarif pajak antar negara menjadi hal menarik bagi perusahaan multinasional untuk menjalankan modus penghindaran pajak. Perwakilan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan biaya tinggi ditempatkan pada negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi, sedangkan perwakilan yang menghasilkan profit tinggi ditempatkan pada negara dengan tarif pajak yang rendah. Dengan melakukan hal tersebut, beban pajak perusahaan akan menjadi rendah dan profit akan maksimal.
2. Perusahaan multinasional masih beranggapan bahwa penghindaran pajak tidak memengaruhi reputasi perusahaan secara langsung. Dengan anggapan bahwa reputasi tidak akan terpengaruh karena tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan multinasional dapat lebih tenang menjalankan tindakan penghindaran pajaknya.
3. Peran kinerja manajer yang memiliki kemampuan tinggi dalam industri tertentu. Dengan mempekerjakan manajer berkemampuan tinggi dan memahami industri yang dijalankan, dapat memberikan efek pada model penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Manajer yang ahli dalam sebuah industri tertentu pasti akan memiliki pemahaman lebih dalam pada proses bisnis perusahaan dan terus berusaha meningkatkan laba perusahaan untuk mendapat insentif tertentu. Dalam rangka pencapaian laba tertentu tersebut , manajer akan berusaha menekan biaya yang salah satunya adalah biaya pajak dengan modus penghindaran pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Untuk perusahaan yang beroperasi lintas negara diberi skor 1, sedangkan untuk perusahaan yang beroperasi lintas domestik diberi skor 0 (Dewi, 2016).
4. **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

**1. PROFITABILITAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Judul Penelitian | Pengaruh *Leverage, Profitability*, UkuranPerusahaan dan Proporsi KepemilikanInstitusional Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: *Leverage, Profitability*, UkuranPerusahaan dan Proporsi KepemilikanInstitusional (X4)  Dependen: *Tax Avoidance* (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | *Leverage* dan *Proftability* memiliki pengaruh negative dan signifkan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif. |
|  |  |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013) |
| Nama Peneliti | Rinaldi dan Cheisviyanny |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal  Dependen: *Tax Avoidance* (Y) |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan Kompensasi Rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. |
|  |  |
| 3.Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage,* dan Pertumbuhan Penjulan Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage,* dan Pertumbuhan Penjulan (X5)  Dependen:*Tax Avoidance* (CETR) (Y) |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *Leverage* *tidak berpengaruh terhadap tax avoidance*. |
|  |  |
| 4.Judul Penelitian | Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas,*Leverag*e dan Komisaris Independen Terhadap PraktikPenghindaran Pajak Pada PerusahaanYang Terdaftar Di BEI |
| Nama Peneliti | Adinda Lionita HdanAni Kusbandiyah |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: *Corporate Social Responsibility, Profitabilitas,**Leverage dan Komisaris Independen* (X4)  Dependen: Pengindaran Pajak (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Variabel *CSR* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dan Variabel Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. |

**2. CAPITAL INTENSITY**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Judul Penelitian | Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak |
| Nama Peneliti | Muadz Rizki Muzakki dan Darsono |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Var. dependen: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*  Var. kontrol: *Size,* Profitabilitas  Var. independen: Penghindaran Pajak (ETR)) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.  Dari dua variabel kontrol antara profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (*Size*), hanya variabel ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. |
|  |  |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Var. dependen: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*  Var. independen: Penghindaran Pajak (*Current* ETR) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.  *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap  *tax avoidance.* |
|  |  |
| 3.Judul Penelitian | Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage, Size, dan Capital Intensity* ratio pada *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Komisaris Independen, *Leverage, Size, dan Capital Intensity*  Dependen: Penghindaran Pajak |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Variabel Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel *Size* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, dan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. |
| 4.Judul Penelitian | Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage, Size, dan Capital Intensity* ratio pada *Tax Avoidance* |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.Judul Penelitian | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) |
| Nama Peneliti | Tawang |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen: *Corporate Social Responbility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity*  Dependen: Penghindaran Pajak |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, Ukuran perusahaan, *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Sedangkan, Inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance perusahaan. |

**3. MULTINASIONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Judul Penelitian | Pengaruh Perusahaan Keluarga, *Multinational Company*, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Nurul Hidayah |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Var. dependen: Perusahaan Keluarga, *Multinational Company,* Kepemilikan Institusional  Var. independen: *Tax Avoidance* (*Book Tax Gap*) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Perusahaan keluarga dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.  *Multinational company* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* |
|  |  |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia |
| Nama Peneliti | Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen: Risiko Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite  Audit, Ukuran Perusahaan, Multinational company, Kepemilikan  Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris  Dependen: Penghindaran Pajak |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Risiko Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan, Multinational Company, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
|  |  |
| 3.Judul Penelitian | *Tax Avoidance Activities of U.S Multinational Company* |
| Nama Peneliti | Rego |
| Tahun Penelitian | 2003 |
| Variabel Penelitian | Independen: Effective Tax Rates, Multinational, Tax Planning  Dependen: Tax Avoidance |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Effective Tax Rates, Multinational, Tax Planning berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance |
| 4.Judul Penelitian | Pengaruh *Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality,* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Erika Rani Puspita, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh |
| Tahun Penelitian | 2018 |
| Variabel Penelitian | Independen: Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality, dan Sales Growth  Dependen: Penghindaran Pajak |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Variabel Multinationality dan Sales Growth berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Variabel Size, Debts, Profitability dan Intangible Assets tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, dan *Multinationality* terhadap *Current ETR.*

1. **Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Current ETR***

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas adalah Return on Asset (ROA). ROA merupakan pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi ROA berarti semakin perusahaan melakukan *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai ETR semakin rendah. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang besar membuat perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari beban pajak.

Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian Putri dan Putra (2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Current ETR*, artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat *Current ETR* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah *(Loopholes)* terhadap pengelolaan beban pajaknya.

1. **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Current ETR***

Putra dan Merkusiwati (2016) mengatakan *capital intensity ratio* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Wijayanti et al.c. (2017), pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Wiguna dan Jati (2017) mengatakan bahwa semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hubungan teori keagenan dengan *Capital Intensity Ratio* perusahaan adalah dimana manajemen memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi tersebut akan dinilai kinerjanya oleh *stakeholder* dan *shareholder*. Menurut Wijayanti et al.c. (2017), intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberpengaruhan intensitas modal terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang besar pula. Karena hal tersebut maka laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang kecil juga. Selain itu, Dharma dan Noviari (2017) menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek *Tax Avoidance*.

1. **Pengaruh Multinationality Terhadap *Current* *ETR***

Multinational *company* adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara (Hidayah, 2015).. Menurut Dewi dan Jati (2014), perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, di mana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Hidayah (2015) mengatakan bahwa manipulasi pajak lain yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah mendirikan *vehicle company* atau *letter box company* di negara-negara yang termasuk *tax haven countries*. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan beroperasi hanya untuk kepentingan perusahaan itu namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholder-*nya

Menurut Hidayah (2015), *Multinational company* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Hasil ini sesusai dengan konsep teori yang menyatakan semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Profitabilitas*

*Capital Intensity*

*Multinationality*

*Current ETR*

1. **Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *Current ETR*.

Ha2 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Current ETR.*

Ha3 : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap *Current ETR*